

piutang yang sering terjadi di tengah-tengah masyarakat dan dilakukan di kehidupan sehari-hari. Pada dasarnya hutang piutang itu bisa terjadi karena adanya faktor kebutuhan yang sangat mendesak yang harus dipenuhi agar dapat mempertahankan kelangsungan hidup individu misalnya digunakan untuk kebutuhan alam, membayar sekolah, berobat bahkan digunakan untuk pengembangan modal usaha.

Bukan rahasia umum lagi, bahwasanya dalam lingkungan masyarakat terdapat berbagai tingkatan ekonomi yaitu si kaya dan si miskin. Apabila seseorang berada di bawah garis kemiskinan, maka diharapkan orang yang mempunyai (kaya) menghutangi atau memberi pinjaman sebagian hartanya kepada yang membutuhkannya (miskin).

Transaksi hutang piutang diharapkan bertujuan untuk memberikan kemudahan dalam urusan manusia itu sendiri serta memberikan jalan keluar dari himpitan masalah yang menyelimuti mereka. Semua itu dilakukan semata-mata untuk mendekatkan diri kepada Allah SWT dan mendapatkan ridha dari Nya.

Jika aturan ini diterapkan akan tercipta suatu tatanan masyarakat yang peduli terhadap nasib orang-orang yang dalam kesulitan dan kesusahan serta menghilangkan adanya tingkat derajat sosial yang telah ada di lingkungan masyarakat. Maka aturan Islam harus dapat mengantisipasi kejadian-kejadian yang menyalahi praktik hutang piutang yang tidak sesuai dengan hukum Islam.

Menurut gambaran sementara yang diperoleh di lapangan, praktik hutang uang dengan pengembalian seharga sapi di Desa Prijekngablak Kecamatan Karanggeneng Kabupaten Lamongan. Dalam pelaksanaan hutang uang dengan pengembalian hutang seharga sapi ini terdapat tiga pihak antara lain pihak yang berpiutang, pihak yang berhutang dan pihak pemilik sapi. Deskripsinya seperti ini semula pihak yang berhutang meminjam sejumlah uang dengan nominal tertentu kepada pihak yang berpiutang. Kemudian pihak yang berpiutang tersebut memberikan sejumlah uang dengan nominal tertentu sesuai dengan yang diinginkan orang yang berhutang tersebut. Akan tetapi, nanti pada waktu pengembalian hutang tersebut diukur seharga sapi orang lain yang menjadi pihak ketiga ini ketika sapi tersebut dijual oleh pemilik sapi dan pemilik sapi ini akan mendapat upah dari perawatan sapi itu.

Seperti ini si A (orang yang berhutang) meminjam uang kepada si B (orang yang berpiutang) sebesar Rp. 5.000.000,- diawal perjanjian, nanti pada waktu pengembalian hutang tersebut diukur dengan seharga sapi si C (Pemilik Sapi) yang dipilih kedua belah pihak yang mana ketika pemilik sapi itu merasa cukup layak sapi tersebut untuk di jual dan laku dengan harga Rp. 10.000.000,- maka orang yang berhutang (B) harus mengembalikan uang yang dipinjam yang pada awalnya Rp. 5.000.000,- menjadi Rp.10.000.000. Namun dari uang Rp 10.000.000 itu yang Rp.2.500.000,- diberikan kepada si C (pemilik sapi) sebagai upah dari

merawat sapi tersebut dan orang yang berpiutang ini mendapatkan Rp 7.500.000.- dari hasil pinjaman orang yang berhutang tersebut.

Namun demikian, untuk mengetahui bagaimana praktik pelaksanaannya dan keadaan sebenarnya dan pandangan hukum Islam terhadapnya , memerlukan penelitian lebih lanjut. Untuk mengetahui sejauh mana aturan hutang piutang dalam Islam untuk dijadikan pedoman umat Islam dalam kegiatan hutang piutang.

Desa ini dijadikan sebagai lokasi penelitian karena dari hasil pengamatan sementara penulis di Desa ini terdapat kasus hutang dengan pengembalian seharga sapi dan praktik tersebut terjadi secara berulang-ulang dan sudah berjalan cukup lama bahkan sudah menjadi kebiasaan masyarakat.

Hal ini membuat sebagian masyarakat Desa Prijekngablak resah dan ada ketidakpuasan. Disana terdapat indikasi tertentu yang merugikan salah satu pihak apabila ditinjau dari norma hukum Islam baik dari segi syarat maupun segi pengembaliannya. Penulis membahas masalah ini karena hutang piutang tersebut dilakukan oleh masyarakat Desa Prijekngablak Kecamatan Karanggeneng Kabupaten Lamongan yang beragama Islam. Penulis merasa perlu memperjelas status hukum tentang hutang uang dengan pengembalian seharga sapi, sehingga masyarakat dapat memperoleh pandangan yang benar dari sudut pandang hukum Islam dalam kegiatan bermuamalah.

Pembahasan masalah hutang piutang telah banyak dibahas dan ditulis dalam karya ilmiah sebelumnya yang dijadikan sebagai gambaran penulisan, sehingga tidak ada pengulangan permasalahan yang sama.

Dari referensi yang penulis telusuri sebenarnya sudah banyak peneliti yang menulis tentang hutang-piutang diantaranya:

1. Ninik Umrotun Chasanah dengan judul *Hutang Piutang Dengan Jaminan Hasil Panen (Analisis Hukum Islam terhadap sisten Hutang Piutang Dengan Jaminan Hasil Panen Tambak Di Desa Banjarsari Kecamatan Buduran Kabupaten Sidoarjo)*, tahun 2011 yang menyatakan bahwa skripsi ini lebih fokus membahas tentang hukum hutang piutang dengan barang jaminan berupa hasil panen tambak sebagai pengembaliannya apabila telah jatuh tempo. Setelah penulis telusuri bahwa hasil dari penelitian ini adalah juragan ikan selaku orang yang berpiutang memberikan syarat-syarat tertentu yang harus dipenuhi oleh orang yang berhutang. Apabila orang yang berhutang tidak mau dengan syarat yang diajukan oleh juragan ikan maka ia tidak akan mendapatkan pinjaman, dan dalam prosesnya hutang piutang ini terjadi karena adanya unsur keterpaksaan. Menurut hukum Islam, pelaksanaan hutang piutang dengan jaminan hasil panen tambak di Desa tersebut kurang

pengembalian hutang diberikan tenggang waktu selama 3 bulan kepada pihak yang berhutang untuk melunasinya. Menurut hukum Islam mengenai hal tersebut adalah sah karena ditinjau dari berbagai sudut obyek hutang, perjanjian hutang, pelaksanaan ijab qabul dan pengembalian hutang didasarkan kerelaan pada kedua belah pihak baik yang berhutang maupun yang berpiutang tidak ada paksaan dari siapapun. Dan transaksi ini dapat disamakan dengan transaksi *murabahah* sehingga menurut hukum Islam sah dan diperbolehkan menurut al-Qur'an, al-Hadis maupun pendapat para ulama'.⁷

4. Aidatur Runis dengan judul *Tinjauan Hukum Islam Terhadap Praktik Jual Beli Sapi Dengan Sistem Hutang Piutang Di Kecamatan Solokuro Kabupaten Lamongan*, tahun 1994 yang menyatakan bahwa terdapat pedagang yang membeli sapi kepada pemiliknya dengan sistem hutang, sedangkan pemilik sapi tersebut memberikan tarif yang berbeda-beda kepada setiap penghutang yang berbeda jangka waktu utangnya. Skripsi ini lebih fokus membahas tentang jual beli sapi dengan sistem hutang. Setelah penulis telusuri hasil dari penelitian ini adalah dilihat dari segi ketentuan yang berlaku bahwa peternak sapi menjual sapi dengan harga yang berbeda-beda antara pembeli secara tunai dengan pembeli yang pembayarannya secara hutang. Dari segi akibat

⁷ Nurrul Nisfu Suci Rofikhoh dengan judul *Tinjauan Hukum Islam Terhadap Hutang Uang dengan Sistem Jual Beli Barang (Murabahah) dari Piutang Di Desa Sawo Babat*, tahun 2008, Fakultas Syariah Jurusan Muamalah.

1. Bab pertama merupakan pendahuluan yang meliputi latar belakang masalah, identifikasi, batasan masalah, fokus masalah, rumusan masalah, kajian pustaka, tujuan penelitian, kegunaan hasil penelitian, definisi oprasional, metode penelitiaan dan sistematika pembahasan.
2. Bab kedua merupakan landasan teori yang membahas tentang hutang piutang (*al-qard*) dalam hukum Islam yang meliputi pengertian hutang piutang (*al-qard*), landasan hutang piutang (*al-qard*), landasan hukum hutang piutang (*al-qard*), rukun dan syarat hutang piutang (*al-qard*) serta konsep mengenai riba.
3. Bab ketiga membahas tentang hasil penelitian yang berisi tentang gambaran umum Desa Prijekngablak Kecamatan Karanggeneng Kabupaten Lamongan serta praktik hutang uang dengan pengembalian seharga sapi di Desa tersebut.
4. Bab keempat berisi tentang analisa terhadap hasil penelitian lapangan yang terdiri dari analisis tentang praktik sistem hutang uang dengan pengembalian seharga sapi di Desa Prijekngablak Kecamatan Karanggeneng Kabupaten Lamongan.
5. Bab kelima pada bab ini meliputi penutup yang memuat tentang kesimpulan dan saran-saran yang terkait dengan yang diteliti.